

# Implementtion of the Information and Public Communication Program of Communications and Informatics Department of Sidoarjo Regency

## [Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo]

Mochammad Alfin Azrial Akbar<sup>1)</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Pbulik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

**Abstract.** *The Department of Communication and Informatics of Sidoarjo Regency plays a crucial role in public information and communication, encompassing areas related to development, social issues, and the local economy in Sidoarjo. Through the established information and public communication programs, the aim is to generate reliable information and ensure responsive two-way communication. Government affairs should priority good of policy implementation. Evaluating implementation process of the information and public communication programs can serve as a basis for program management improvements. For evaluation purposes, researchers are using the implementation process model by Edward III to assess the quality the information and public communication programs implemented by Diskominfo Sidoarjo. Consequently, the research findings can serve as a reference for revitalizing Diskominfo programs, aiming to enhance public trust and improve public policies.*

**Keywords** – Information and Public Communication; Implementation Process

**Abstrak.** *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo berperan penting pada informasi dan komunikasi publik, baik terkait pembangunan, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Sidoarjo. Melalui program informasi dan komunikasi yang dicanangkan diharapkan menghasilkan informasi tepercaya dan komunikasi dua arah yang cepat tanggap. Urusan pemerintah seyogianya mengutamakan implementasi kebijakan yang laik. Evaluasi implementasi proses atas program informasi dan komunikasi publik dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan program. Dalam mengevaluasi, peneliti menggunakan model proses implementasi oleh Edward III yang responsif untuk menguji kualitas pengelolaan program informasi dan komunikasi publik Diskominfo Sidoarjo. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam revitalisasi program Diskominfo.*

**Kata Kunci** – Informasi dan Komunikasi Publik; Implementation Process

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan untuk membangun tingkatan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan banyak manfaat baik dalam segi pelayanan, pengelolaan informasi dan mengembangkan teknologi informasi itu sendiri seperti pengembangan perangkat lunak jaringan. Adapun komunikasi sebagai bentuk penyampaian informasi adalah sebuah hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dikarenakan informasi dan komunikasi adalah bahan utama bagi manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Achmad menjelaskan bahwa komunikasi antar manusia melibatkan orang lain sebagai pihak penerima yang selanjutnya akan mendapatkan informasi baru yang sebelumnya tidak diketahui oleh orang tersebut. Era modern saat ini juga menambah nilai kemahalan sebuah informasi, dimana sebuah informasi adalah hal yang berharga dan dapat menentukan keberhasilan seseorang atau lembaga [1].

Program informasi dan komunikasi institusi pemerintah menjadi salah satu kunci penting bagi terselenggaranya pelayanan publik yang baik. Di era digital saat ini, penyampaian informasi dan komunikasi menjadi begitu mudah dengan didukung oleh perkembangan teknologi. Teknologi digital membawa informasi dan komunikasi pada kemajuan yang mencengangkan. Lebih, cepat dan masif. Teknologi digital khususnya pada informasi dan komunikasi juga dapat membuka ruang-ruang inovatif dan optimism baru bagi terselenggaranya program informasi dan komunikasi yang transparan dan akuntabel. Didukung oleh teknologi digital, program informasi dan komunikasi publik sehausnya lebih responsif guna mengakomodir situasi sosial di masyarakat yang dinamis.

Lembaga pemerintah dituntut untuk membangun program informasi dan komunikasi yang lebih adaptif, informatif, responsif, dan inklusif. Pencapaian atas empat aspek tersebut diukur dari sejauh mana efektivitas program informasi dan komunikasi yang telah diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Menurut Organisation for Economic Cooperation and Development/OECD (Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi), Komunikasi publik

dikatakan efektif, apabila memenuhi lima psinsip: pertama, mengoptimalkan tujuan komunikasi publik. Kedua, menerapkan profesionalitas dalam komunikasi. Ketiga, menjadi lebih informatif. Keempat, menerapkan teknologi dan berdasarkan data. Kelima, mencegah disinformasi [2].

Lebih lanjut program informasi dan komunikasi publik dapat menciptakan kepercayaan publik kepada lembaga pemerintah dan kebijakan yang relevan dengan situasi sosial dan ekonomi apabila dikelola dengan prinsip keefektifan. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari kapabilitas lembaga pemerintah dalam beradaptasi dengan beragam situasi yang dinamis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat. Kapabilitas dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi mutlak bagi lembaga pemerintah yang dimandati oleh undang-undang terlebih UU No. 39 Tahun 2008 untuk secara khusus membidangi urusan informasi dan komunikasi yakni kementerian komunikasi dan informatika. Di tingkat daerah maka pelaksanaan di ranah tersebut menjadi ranah dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota. Dinas komunikasi dan informatika kabupaten/kota bertugas membantu bupati atau wali kota untuk menyampaikan informasi ke masyarakat dan menjalin komunikasi publik. Pada hal ini, bupati sidoarjo dibantu oleh dinas komunikasi dan informatika atau DISKOMINFO kabupaten sidoarjo.

Dinas komunikasi dan informatika merupakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tugas tersendiri. Menurut PERBUP (Peraturan Bupati) Nomor 89 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo pada Bab 3 pasal 4, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo membantu agar Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang dikirimkan kepada kabupaten. Pada pasal 5, melakukan tugas yang diperuntukkan pada pasal 4, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalankan fungsi untuk: pertama, melakukan perumusan kebijakan urusan komunikasi dan informatika, stastik, dan persandian. Kedua, melaksanakan urusan kebijakan komunikasi dan informatika. Ketiga, melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan komunikasi dan informatika. Keempat, melaksanakan administrasi dinas. Kelima, melakukan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi dari DISKOMINFO.

Pada dinas komunikasi dan informatika terdapat beberapa bidang, seperti bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, bidang tata kelola informatika, bidang infrastruktur dan keamanan tekonlogi ifnromasi dan komunikasi, serta bidang stastistik. Peneliti ini akan berfokus pada di bidang salah satu di dinas komunikasi dan informatika yaitu Bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

**Tabel 1.** Nama-Nama aplikasi/web layanan publik

Aplikasi/Website	Kategori	kegunaan
Sipraja	Aplikasi layanan publik	Aplikasi layanan sipraja ini merupakan aplikasi untuk pelayanan publik yang menghadirkan berbagai layanan administratif kependudukan yang ada di sidoarjo.
Plavon	Aplikasi layanan publik	Layanan plavon ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen administratif kependudukan yang ada di sidoarjo.
Antrian MPP	Aplikasi layanan publik	Aplikasi antrian MPP ini digunakan untuk memudahkan masyarakat registrasi antrian online di MPP Sidoarjo.
E-Kliping	Aplikasi layanan publik	Aplikasi e-kliping ini untuk menyebarkan informasi publik yang ada di sidoarjo.
Sp4n Laporan	Pengaduan	Layanan sp4n laporan ini untuk penyampaian semua aspirasi dan pengaduan dari masyarakat kepada opd yang ada di pemerintah sidoarjo.
112 Sidoarjo Call Center	Pengaduan	Layanan 112 sidoarjo call center merupakan layanan yang dapat digunakan saat terjadi keadaan darurat dengan menghubungi nomor 112 yang akan terhubung dengan pusat panggilan darurat.

P3M

Pengaduan

Dengan P3M masyarakat kabupaten sidoarjo dapat mengadukan permasalahan kepada diskominfo, P3M kini merupakan pemkab sidoarjo membangun komunikasi dengan masyarakat sidoarjo.

*Sumber : Diolah dari Sidoarjokab (2024)*

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo mengelola banyak aplikasi yang digunakan oleh masyarakat sidoarjo. Jumlah website atau aplikasi yang dinaungi DISKOMINFO Sidoarjo tersebut terus bertambah setiap tahunnya.

Salah satu hal krusial yang menjadi isu strategis dalam renstra tersebut adalah minimnya transparansi atas pengelolaan informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Sidoarjo. UU No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik yang bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparansi, efektif, dan efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan [3]. Tidak mengherankan jika mengacu pada publikasi pada laman DISKOMINFO Sidoarjo tidak ada satupun laporan transparansi terkait program informasi dan komunikasi publik. Laporan rencana aksi tahun anggaran 2020 juga belum dapat memenuhi aspek transparansi. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik tidak disampaikan secara menyeluruh dan lebih rinci. Alih-alih menjabarkan detail hasil program secara rinci, laporan hanya menyajikan data dalam bentuk presentase capaian target. DISKOMINFO Sidoarjo seharusnya mulai berbenah. Transparansi pengelolaan informasi dan komunikasi publik dapat berdampak signifikan pada kemajuan perbaikan pelayanan dan kebijakan publik serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Permasalahan selanjutnya ialah terbatasnya anggaran dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dari beberapa program di DISKOMINFO dalam pengelolaan kurang maksimal terutama program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Selain itu juga permasalahan dari program informasi dan komunikasi publik ini masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia di bidang IT.

Penelitian terkait program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO secara umum masih terbatas. Namun beberapa penelitian terdahulu yang mengamati tentang program yang ada di DISKOMINFO tertentu sudah cukup memadai. Penelitian terhadap perfoma penggunaan teknologi informasi oleh Achamd Muchsinul dkk (2021) dengan objek penelitian adalah DISKOMINFO Malang misalnya, penelitian tersebut menghasilkan tiga butir rekomendasi yang menggarisbawahi pendokumentasian, proses, dan kendala manajemen TI [4]. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh yuriewati pasoreh (2017) dalam penelitian ini berjudul "Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi ". Adapun tujuan penelitian ini mengetahui bagaimana implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan e-government pada lembaga kominfo di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan mengkaji teori terkait media zaman global. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi e-government bertujuan untuk menjadi mediator antara pemerintah dengan masyarakat dengan terbuka, dan untuk mempermudah proses transfer informasi [5]. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kevin Maluwu (2021) dalam penelitian ini berjudul "Implementasi Program Smart City di Dinas Komunikasi dan Informatika". Penelitian satu ini bertujuan untuk mengkaji kegunaan implementasi smart city di lembaga dinas informasi dan komunikasi kota manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *smart city* masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala diantaranya kurangnya sumber daya manusia yang mencukupi baik di lingkungan pemerintah ataupun individu yang ahli didalam bidang IT [6]. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nicolin Manoppo (2022) dalam penelitian ini berjudul "Implementasi Program Cerdas Command Center di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program cerdas command center di DISKOMINFO Kota Manado. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini dinilai masih belum cukup baik, Adapun kendala yang ditemukan adalah minimnya infrastruktur TIK dan juga kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni didalam bidang TIK [7].

Berdasarkan refrensi pada penelitian terdahulu diatas, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah penulis akan meneliti dan berfokus pada implementasi program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo. Guna menguji implementasi program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Sidoarjo, peneliti menggunakan metode evaluasi implementasi program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO untuk mengetahui efektifitas penerapan program guna mencapai tujuan. Goerge C Edwerds III menyatakan bahwa tahapan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi [8]. Keempat faktor tersebut dapat membawa informasi dan komunikasi mencapai sasarannya. Apabila dihubungkan dengan permasalahan yang telah disebutkan maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo.

## II. METODE

Dalam penelitian terkait “Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo” merupakan penelitian deskriptif dengan jenis data kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan pengumpulan data narasi dan wawancara yang berdasar pada tempat dimana penelitian dilakukan [9]. Sedangkan penelitian lainnya menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada penelitian dengan tujuan guna memahami gejala dan fenomena serta komprehensif yang dialami oleh subjek penelitian terhadap beberapa persoalan seperti tindakan, motivasi, persepsi dan lain sebagainya dengan menggunakan deskripsi sebagai penjelasannya. Dengan penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk mengetahui dan menjabarkan secara rinci serta mendalam terkait implementasi program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo. Lokasi penelitian ini ialah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana menjalankan program informasi dan komunikasi publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo yang menggunakan teori dari Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini berlandaskan pada empat indikator yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Adapun tehnik *purposive sampling* adalah tehnik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti sehingga kebutuhan dari penelitian dapat terpenuhi (Sugiyono 2018:138). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sementara sumber data skunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, artikel, jurnal ilmiah dan dokumen yang tersedia seperti Rencana Strategi (RENSTRA). Teknik analisa data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri atas beberapa langkah yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan menyimpulkan hasil data serta melakukan verifikasi (*conclusion*) [10].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang didapatkan peneliti, maka peneliti akan membahas dengan menggunakan teori dari Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III dalam [11]. Menurut Edward III dalam menjalankan implementasi kebijakan terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

### Komunikasi

Dalam indikator komunikasi menjelaskan bahwa kegiatan atau rangkaian hingga informasi kebijakan mampu mengetahui apa yang perlu dipersiapkan serta disampaikan untuk mencapai misi yang telah direncanakan hingga tepat sasaran. Komunikasi memastikan apakah target implementasi dapat tercapai. Sehingga komunikasi ini membawa dampak penting bagi tercapainya sebuah implementasi program [12]. Menurut Edward III, kebijakan publik hendaknya dilakukan dengan efektif antara penyelenggara kebijakan maupun rancangan dan pelaksana kepentingan. Dengan komunikasi, misi dan tujuan kebijakan dapat tersosialisasi dengan baik [13].

Terwujudnya pelaksanaan kebijakan diperlukan suatu hubungan yang baik antara internal implementator dan hubungan implementator kepada masyarakat. Disini peran komunikasi sangat penting untuk mensinergikan setiap aktivitas. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi yang akurat, jelas, konsisten, dan menyeluruh serta koordinasi antara instansi-instansi yang terkait dalam proses implementasi dan bentuk koordinasi yang dilakukan apakah koordinasi horizontal, vertikal ataupun diagonal.

Komunikasi dalam implementasi keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik meliputi informasi yang memadai, sosialisasi dan kepentingan. Agar kemudian implementasi menjadi efektif, maka mereka yang menanggungjawabnya adalah untuk mengimplementasikan sebuah program mesti tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi tertutup sehingga secara tidak langsung masyarakat dapat memberikan pengawasan kepada pemerintahan. Masyarakat akan semakin cerdas melihat kebijakan-kebijakan pemerintahan yang berdampak langsung kepadanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bagi penyelenggara pemerintahan untuk ikut mendorong terwujudnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Namun disayangkan, pada Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo, keterbukaan informasi masih belum memadai. Informasi yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat masih terbatas pada informasi yang kurang penting, dan cara penyampaiannya pun tidak secara langsung kepada masyarakat. Karena banyak informasi yang harus diakses harus melalui internet, dan seperti kita ketahui di Kabupaten Sidoarjo belum semua daerah sepenuhnya dapat menjangkau internet dengan jaringan yang maksimal. Ditambah lagi rata-rata pengguna internet didominasi oleh kalangan anak muda.

Penyampaian informasi mengenai suatu kegiatan akan lebih efektif apabila dilakukan secara langsung, baik dengan mengundang masyarakat dalam rapat ataupun dengan pemberitahuan ke tempat tinggal masyarakat. Disini peneliti melihat kurangnya sosialisasi secara langsung oleh Kominfo kepada masyarakat, tentang keberadaan informasi-informasi mengenai perencanaan, penganggaran dan lain-lain. Karena juga banyak masyarakat yang belum tau apa sebenarnya fungsi dan tugas dari Kominfo. Tetapi menurut hasil wawancara bahwa rapat-rapat mengenai kegiatan pemerintahan hanya mengundang orang-orang dari kalangan tertentu, sehingga tidak mewakili masyarakat yang terdampak secara keseluruhan.

### Sumber Daya

Masalah sumber daya juga merupakan hal yang penting dalam melaksanakan dan merealisasikan jalannya suatu program. Sering terjadi bahwa keterbatasan sumber daya menjadi kendala pelaksanaan program, sehingga hasil pelayanan terhadap kepentingan publik menjadi kurang maksimum. Menurut informasi yang diterima dari informan, pelaksanaan pemerintahan sudah sesuai dengan kepentingan publik, dan dampaknya secara fisik telah diterima masyarakat. Dalam bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik terdapat 10 pegawai dengan tugas dan peran masing-masing. Berikut adalah pegawai yang terdapat pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik di Diskominfo Kabupaten Sidoarjo :

**Tabel 2. Pegawai Bidang Pengolahan dan Informasi Publik**

No	Nama	Jabatan
1.	Suharti, S.E	Pengelola Data
2.	Dewi Zumrotus S	Pengelola Data
3.	Riska Widya Septianingrum, S. Ikom	Pengelola Data
4.	Alikasan	Pengelola Data
5.	Pujihartini, S. Sos	Pengelola Kegiatan
6.	Arif Budianto, S.T	Penyusun Berita Dan Pendapat Umum
7.	Isnawati, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat
8.	Sriani, S.S	Pranata Hubungan Masyarakat
9.	Dinda Bestari Martaningrum, S.S	Pranata Hubungan Masyarakat
10.	Eni Sri Widyaningsih, S. Sos	Pranata Hubungan Masyarakat
11.	Anita Yudi Jayanti, S. Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

Sumber: *Diolah dari Sidoarjokab (2024)*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, ditemukan kendala terkait sumber daya pegawai. Kendala berupa terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia pada bidang IT. Hal tersebut sejalan dengan tabel 2 diatas, pada tabel tersebut menunjukkan bahwa pegawai dengan lulusan IT masih sangat sedikit yakni hanya berjumlah 1 orang yang mana seharusnya seluruh pegawai pada bidang tersebut memiliki gelar yang berkaitan dengan teknologi informasi.

**Tabel 3. Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan Pegawai Bidang Pengolahan dan Informasi Publik**

No	Kesesuaian Latar Belakang Pendidikan	Jumlah
1.	Sesuai	1
2.	Tidak sesuai	10
	Total	11

Sumber : *Diolah dari Sidoarjokab (2024)*

Berdasarkan Tabel 2 dapat diidentifikasi bahwa latar belakang pendidikan pegawai pada Bidang Pengolahan dan Informasi Publik mayoritas tidak sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial memiliki peran yang cukup penting dalam keberlangsungan sebuah program. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo telah menyusun rancangan anggaran untuk program informasi dan komunikasi publik

yang tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Rancangan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4. Anggaran Program Informasi dan Komunikasi Publik**

Tahun	Anggaran
2021	Rp 3.922.641.104
2022	Rp 3.115.822.880
2023	Rp 3.178.139.338
2024	Rp 3.313.528.073
2025	Rp 3.399.348.450
2026	Rp 3.418.724.737

Sumber : *Diolah dari Sidoarjokab (2024)*

Pada Diskominfo Kabupaten Sidoarjo ini sering terjadi penyelewengan dana sehingga sangat merugikan kepentingan umum. Setiap penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu akan mengurangi besarnya dana yang dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum. Masyarakat menjadi resah karena ternyata apa yang mereka terima masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan apabila semua sumber daya keuangan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan umum tanpa adanya penyelewengan. Di Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai tidak lengkapnya data-data laporan keuangan tiap dinas. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan belum dapat ditanggapi dengan cara memperbaikinya.

Dalam menyelenggarakan sebuah program diperlukan pula sumber daya fisik atau infrastruktur. Berikut adalah sumber daftar sumber daya infrastruktur pada Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik :

**Tabel 5. Sumber Daya Infrastruktur Pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

Sarana Prasarana	Jumlah	Spesifikasi
Laptop	2	Asus dan Accer
Printer	3	Epson LX 300, Hp Leser Jet, Epson L200
Komputer Layar dan CPU	4	HP, LG dan Samsung
Handycam Sony HXR	1	NX 100 FULL

Sumber : *Diolah dari Sidoarjokab (2024)*

Berdasar tabel 5 dapat diketahui bahwa sumber daya infrastruktur yang dimiliki diskominfo pada bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Kabupaten Sidoarjo memiliki dua laptop dan tiga printer serta sebuah handycam. Fasilitas tersebut digunakan untuk emnunjang keluhan dan laporan masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

### Disposisi

Disposisi atau kecenderungan tingkah laku pihak yang terlibat dalam suatu program sangat menentukan keberhasilan program. Pihak yang terkait dengan program keterbukaan informasi publik cenderung mempunyai sikap yang baik dalam menyikapi keluhan masyarakat terkait dengan program yang dilaksanakan. Menurut peneliti, adanya SOP bagi dinas tapi belum digunakan secara menyeluruh, menimbulkan belum adanya pedoman yang jelas dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 keterbukaan Informasi Publik. Pemkab Sidoarjo dalam menjalankan program informasi dan komunikasi publik berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik [14].

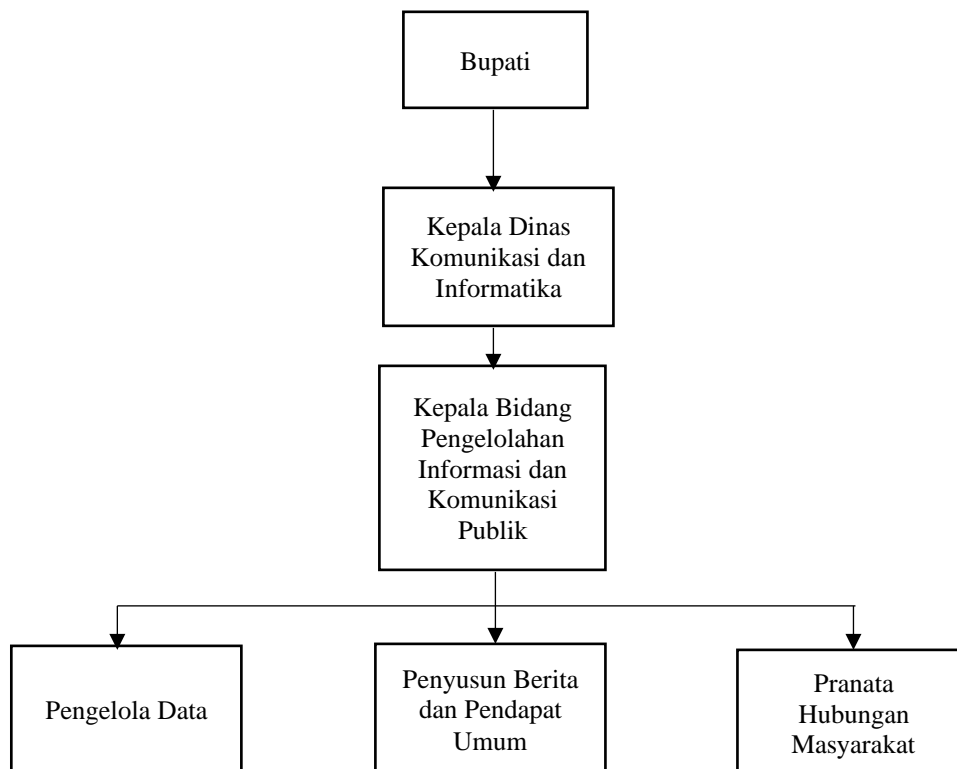
Menurut hasil wawancara, dinas Kominfo secara serius menanggapi keluhan yang timbul dari masyarakat khususnya mengenai data-data yang kurang memadai. Namun sering terjadi bahwa sumber daya dana yang tersedia tidak mencukupi sehingga realisasi penanganan pembangunan yang belum terlaksana belum dapat ditanggapi dengan cara dikerjakan. Menurut hasil peneliti bisa menyimpulkan Variabel yang paling berpengaruh adalah komunikasi dibanding variabel sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi. Hal ini disebabkan komunikasi merupakan jembatan

antara pemerintahan dengan masyarakat. Informasi yang sudah tersedia di Dinas Kominfo tidak dapat diterima masyarakat jika tidak dikomunikasikan dengan baik.

Hingga saat ini menurut informasi yang didapatkan peneliti dari Kominfo bahwa informasi yang diberikan oleh kominfo Kabupaten Sidoarjo kepada publik telah memadai sesuai dengan Landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta dikecualikan. Juga Kominfo terus berbenah ke arah yang lebih baik agar informasi dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Banyak sekali tantangan dari Kominfo Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas, dan kiranya itu dapat menjadi catatan penting kedepannya.

### Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah aspek keempat implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini sebenarnya meliputi dua aspek penting, yaitu mekanisme pelaksana atau standard operating procedure (SOP), dan struktur organisasi atau pembagian kerja [15]. Struktur birokrasi akan cukup baik apabila pihak-pihak yang terkait dengan implementasi program melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikut serta ke lapangan memantau pelaksanaan program. Pihak yang terkait dengan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Bupati Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Program Informasi dan Komunikasi Publik, pembagian tugas dan wewenang serta ketepatan atau kesesuaian pelaksana implementasi informasi dan komunikasi publik. Berikut merupakan bagan pelaksana Program Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:



**Gambar1. Bagan Pelaksana Program Informasi dan Komunikasi**

Berdasar gambar tersebut diketahui bahwa terdapat tiga sub bidang pada bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Menurut informasi dari berbagai pihak diketahui bahwa fungsi pengawasan atas pelaksanaan penyampaian informasi telah dilakukan dengan baik. Para pimpinan yang terkait dengan fungsi pengawasan telah memantau secara langsung ke lapangan untuk mengetahui bahwa suatu proyek telah dibangun dengan baik, dan juga memastikan bahwa program tersebut benar-benar sesuai dengan kepentingan publik dalam arti terdapat banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Namun demikian bahwa standar operasi prosedur atau SOP dalam implementasi setiap kebijakan pada dinas Kominfo belum cukup jelas sehingga dapat membingungkan implementor dalam bertindak. Disamping itu, struktur birokrasi masih terlalu panjang dan proses pengawasan menjadi kurang efektif.

**Tabel 6. SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat DISKOMINFO Sidoarjo**

Urutan	SOP Pelayanan Pengaduan Masyarakat
Pertama	Pengguna layanan (pengadu) menyampaikan pengaduan tertulis ditujukan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media aduan yang telah disediakan.
Kedua	Pengguna layanan menunggu hasil disposisi pimpinan terkait materi aduan.
Ketiga	Pengguna layanan akan menerima surat/ konfirmasi atas pengaduannya. Surat berisikan jawaban atas pengaduan, detail waktu dan metode penanganan pengaduan yang dikirim kepada kontak yang di cantumkan dalam aduan.

Sumber : *Diolah dari Sidoarjokab (2023)*

Berdasar tabel 6 dapat diketahui bahwa pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki SOP Layanan pengaduan masyarakat yang dapat dipergunakan masyarakat Kabupaten Sidoarjo untuk mengadukan keluhan terhadap layannya yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga nantinya akan ada perbaikan dari pelayanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

## VII. SIMPULAN

Berdasarkan indikator pada pengukuran Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik dilihat dari Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi dalam implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik DISKOMINFO Kabupaten Sidoarjo maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Komunikasi, komunikasi memainkan peran krusial untuk memastikan pemahaman yang tepat dan sinergi antara pihak terkait. Keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada efektivitas komunikasi, baik secara internal antara penyelenggara kebijakan maupun eksternal dengan masyarakat. Keterbukaan informasi dan komunikasi publik menjadi elemen kunci, namun tantangan terkait akses internet di beberapa daerah perlu diatasi. Pentingnya sosialisasi langsung kepada masyarakat oleh instansi terkait, seperti Kominfo, tidak dapat diabaikan agar informasi yang disampaikan dapat lebih merata dan menyeluruh. Dengan demikian, perlu adanya upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik guna mendukung implementasi kebijakan secara efektif dan inklusif.

Sumber Daya, masalah sumber daya menjadi faktor kritis yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutan program tersebut. Meskipun pelaksanaan pemerintahan di Dinas Kominfo Kabupaten Sidoarjo diakui sesuai dengan kepentingan publik dan memberikan dampak positif secara fisik, penyelewengan dana menjadi kendala serius. Penyalahgunaan dana tersebut mengakibatkan ketidakefektifan pelayanan publik dan merugikan kepentingan umum. Meskipun Dinas Kominfo merespons keluhan masyarakat terkait kelengkapan data laporan keuangan, keterbatasan sumber daya dana menjadi hambatan dalam merespons secara optimal. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan pengelolaan sumber daya menjadi kunci untuk memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Disposisi, disposisi atau kecenderungan tingkah laku pihak terlibat menjadi faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan. Meskipun pihak terkait menunjukkan sikap positif dalam menyikapi keluhan masyarakat, adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya terimplementasi mengakibatkan kurangnya pedoman yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi yang efektif dalam implementasi program Keterbukaan Informasi Publik memerlukan keterlibatan aktif pihak terkait, termasuk Bupati Kabupaten Sidoarjo, Kepala Dinas Kominfo, dan Kepala Bidang Program Informasi dan Komunikasi Publik. Meskipun fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan penyampaian informasi dianggap baik, terdapat kekurangan dalam kejelasan Standar Operasional Prosedur (SOP) implementasi kebijakan di Dinas Kominfo. Hal ini dapat membingungkan implementor dalam bertindak, menandakan perlunya peningkatan dalam penyusunan panduan operasional yang lebih tegas.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat tauhid dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tentang “Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo” hingga selesai. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, penulis ingin berterimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penelitian ini khususnya kedua orang tua saya dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten



Sidoarjo tempat dimana saya melakukan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

## REFERENSI

- [1] F. Rumra, "Management Of Public Information At Information Fatmawati Rumra Mencermati berbagai kewenangan pemerintah daerah bersama jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang kelembagaan Daerah , fungsi kelembagaan infokom mampu ini ,” *J. Penelit. Komun. dan Opini Publik*, pp. 177–188, 2018.
- [2] "OECD Report on Public Communication,” *OECD Rep. Public Commun.*, 2021, doi: 10.1787/22f8031c-en.
- [3] KOMINFO, "Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” *مجلة العربية*, vol. 2, no. 5, pp. 1–179, 2010,
- [4] A. Muchsinul, H. Malik, A. Rachmadi, and A. R. Perdanakusuma, "Evaluasi Manajemen dan Tatakelola Teknologi Informasi pada Dinas Kominfo Kota Malang dengan menggunakan Framework Cobit 2019,” *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 5, no. 12, pp. 5437–5448, 2021, [Online]. Available: <http://j-ptiik.ub.ac.id>.
- [5] P. humisar Parsaorantua, Y. Pasoreh, and sintje A. Rondonuwu, "Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado),” *Acta Diurna*, vol. VI, no. 3, pp. 1–14, 2017.
- [6] K. Maluwu, F. A. G. Tulusan, and N. Palar, "Implementasi Program Smart City Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado,” *Partisipasi Masy. Pada Pencegah. Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kec. Wanea Kotamanado*, vol. VII, no. 102, pp. 43–52, 2021.
- [7] F. S. Yelvita, "Implementasi Program Cerdas Command Center Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Manado,” *γ787*, vol. 2, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022.
- [8] S. Bahri, B. Sujanto, and Madhakomala, *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu*. 2020.
- [9] "Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9 (pp. 1–8).,” *J. Equilib.*, vol. 5–9, 2009, [Online]. Available: [yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf](http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf).
- [10] S. Yunengsih and S. Syahrilfuddin, "the Analysis of Giving Rewards By the Teacher in Learning Mathematics Grade 5 Students of Sd Negeri 184 Pekanbaru,” *J. PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran)*, vol. 4, no. 4, p. 715, 2020, doi: 10.33578/pjr.v4i4.8029.
- [11] Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [12] Mandala, E., Setyadiharja, R., & Nurul Mulyani, J. Ri. R. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) (Studi Kasus di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kijang). *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 247–264. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.247-264>.
- [13] Ummah, K., & Choiriyah, I. U. (2022). *Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Naskah Dinas Elektronik Kabupaten Sidoarjo ( E-Buddy ) ( Studi Kasus di Pemerintah Desa Kajeksan Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo ) ( Implementasi E-Government Melalui Sidoarjo Aplikasi Naskah Dinas Elektron*. 1–11
- [14] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2012 tentang Prosedur Layanan Informasi Publik
- [15] Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>.

### **Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*